

ANALISIS FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG

Ifka Sri Ulina Br. Tondang¹, Gembira Marbun²

Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas

Ifkatondang1012@gmail.com ; gembiramarbun@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of Village Fund Management Apparatus Competence, Village Government Organizational Commitment, and Information Community Participation on Village Fund Management Accountability in Deli Serdang Regency. The type of research used in this research is quantitative research. Data collection was obtained by distributing questionnaires directly to respondents consisting of the Village Head, Village Secretary, Head of Government Section, Head of Service Section, Head of Welfare Section and Head of Financial Affairs/Treasury in villages in Deli Serdang. The location of the research was carried out at the village head office in villages in Deli Serdang Regency which had been randomly selected based on the simple random sampling method. Meanwhile, after calculating the sample using the Slovin formula, a sample of 57 respondents was obtained.

The results in this study found that the competence of village fund management apparatus, village government organizational commitment, and community participation had a positive and significant influence on Village Fund Management Accountability in Deli Serdang Regency. And the result of the Adjusted R Square value is 0.846, which means (84.6%) of the independent variables are able to explain or describe the dependent variable, while the remaining 15.4% is explained or described by other variables not included in this research model.

Keywords: *Village Fund Management Apparatus Competence, Village Government Organizational Commitment, and Community Participation*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa muncul diawali dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengamankan pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya yaitu pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa. Kewenangan yang diberikan undang-undang ini menjadikan desa harus mampu melakukan secara mandiri dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Zulaifah, 2020). Dan tentunya dalam hal ini pemerintah desa tidak mengelola dana desa dalam jumlah sedikit, melainkan mengelola dana dalam jumlah banyak. Setiap desa akan mengelola anggaran berupa dana desa yang akan diterima secara bertahap (Lembaran & Republik, 2014). Salah satunya ini dirasakan oleh desa-desa yang terdapat pada Kecamatan Percut Sei Tuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya data yang penulis dapatkan atas pembagian dana desa yang setiap tahunnya digelontorkan kepada desa-desa yang terdapat pada Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membantu desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik seperti meningkatkan pembangunan, pembinaan, pelayanan dan

pemberdayaan pada masyarakat desa, hingga akhirnya dapat membuat desa tersebut menjadi mandiri dan sejahtera masyarakatnya.

Tahun 2019 dan tahun 2020 pada Kabupaten Deli Serdang telah menerima anggaran dana desa tiap tahunnya dan tentunya memiliki jumlah dana desa yang berbeda-beda tiap tahunnya yang disebabkan oleh adanya perhitungan anggaran dana desa yang didasarkan pada jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Arif, 2018). Oleh karena itu, pemerintah desa dalam mengelola dana desa tetap harus menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan penuh pertanggungjawaban dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa dapat berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bagaimana pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan-tahapan yang lainnya. Siklus Pengelolaan Keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, dalam Pengelolaan Dana Desa dituntut oleh adanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana salah satu pilarnya akuntabilitas (Pertanggungjawaban). Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai tanpa adanya pilar dari (*Good Governance*) itu sendiri diantaranya adalah akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan yang bersifat akuntabel adalah harapan dan keinginan bagi setiap organisasi pemerintahan. Baik itu ditingkat pusat ataupun ditingkat daerah, hal ini dilakukan demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga tidak akan menimbulkan potensi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak berkepentingan. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan oleh pemerintah desa, demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya. Akuntabilitas dapat memberikan gambaran dari sumber daya yang telah dikelola oleh pemerintah, Akuntabilitas dapat menjadi kontrol terhadap segala aktivitas/kegiatan yang dilakukan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, maka dari itu akuntabilitas sangat penting keberadaannya dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena prinsip akuntabilitas diatas, bahwa terwujudnya akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari adanya kompetensi yang dimiliki oleh setiap aparatur desa. Kompetensi Aparatur yang mumpuni dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan sangat baik (Medianti, 2018). Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan terdapat ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Warisno, 2008), sehingga informasi yang diterima masyarakat nantinya akan menjadi tidak tepat dan tentunya dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan desa yang baik pemerintah desa terkait harusnya mempunyai sumber daya berkualitas yang tentunya di dukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan/seminar dan tentunya mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Sembiring, 2013).

Berkaitan dengan kondisi kompetensi aparatur desa, fenomena yang terjadi menunjukkan beberapa pemerintahan desa khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan ini mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbilang sangat kurang. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kasus korupsi dana desa serta adanya dugaan penyelewengan dana desa di beberapa desa di Kecamatan Percut Sei Tuan. Kasus korupsi penyimpangan dana desa sebesar Rp 782 Juta pada tahun anggaran 2016 yang dilakukan oleh Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan yang berinisial CA. Kerugian negara atas kasus korupsi dana desa itu mencapai Rp 400 juta dan uang tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi (Merdeka.com, 2017).

Fenomena tentang kasus korupsi dana desa serta adanya dugaan penyelewengan dana desa di Kecamatan Percut Sei Tuan menunjukkan kualitas SDM yang masih kurang terkait pengelolaan dana desa. Kepala desa seharusnya selaku pihak yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa dituntut agar lebih kompeten dan akuntabel dalam mengelola dana desa (Lubis et al., 2020). Terlebih kemampuan sebagian besar SDM yang mengelola keuangan desa menjadi hal yang perlu diperhatikan, aparatur desa yang belum sepenuhnya paham mengenai pengelolaan dana desa dikarenakan tingkat pendidikan yang tidak sesuai menjadi salah satu faktor kompetensi aparatur desa sering mengalami kesulitan atau membuat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain kompetensi, faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah komitmen organisasi (Mada et al., 2017). Menurut (Khimah, 2005) Komitmen organisasi dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen ditandai dengan adanya keyakinan yang kuat terhadap tujuan organisasi, memiliki keinginan untuk tetap berada dalam organisasi, dan bersedia meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran organisasi.

Menurut (Simanjuntak, 2005) menyatakan bahwa komitmen merupakan kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang telah dipercayakan kepada seseorang. Komitmen Organisasi yang kuat akan memungkinkan semua anggota organisasi bisa meningkatkan sumber daya fisik, mental serta spiritual tambahan yang diperoleh. Oleh karena itu aparatur desa harus memiliki sikap bersedia mengerahkan segala upaya dalam melakukan pekerjaan sehingga pengelolaan desa dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan komitmen organisasi jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi, masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan dana desa kebagian Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang diakibatkan oleh aparatur desa menandakan bahwa sikap etos kerja atau komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparatur desa masih dikatakan kurang.

Pada tahun 2020 masih terdapat 5 desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan dana desanya pada pihak Kecamatan Percut Sei Tuan. Dimana menurut Kasi PMD Deli Serdang keterlambatan dalam penyampaian laporan dana desa ini terjadi dikarenakan aparatur desa yang kurang disiplin dalam melaporkan dana desanya. Bahkan menurutnya terdapat beberapa desa yang setiap tahunnya selalu terlambat dalam melaporkan dana desanya. Dengan adanya hal tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri, jika terus terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban mengenai dana desa pada periode berjalan, maka pada periode selanjutnya akan mengalami keterlambatan dalam peluncuran anggaran dana pada desa tersebut sehingga akan mengakibatkan terkendalanya pemerintah desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan mengenai desentralisasi otonomi (Savitri, 2019).

Kurnia (2019) menjelaskan dalam hal pengelolaan dana desa harus seimbang dengan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dengan melakukan pelaporan secara periodik pada pemerintahan di atasnya yaitu Bupati/Walikota dan masyarakat, hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa kedepannya dalam hal pembangunan serta pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan dana desa yaitu 1 (satu) bulan pada periode selanjutnya, pada bulan juli tahun pertama untuk laporan semester pertama dan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya untuk semester akhir, hal ini terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 yang mengatur bagaimana siklus dan batas waktu pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang dikarenakan kemampuan berpartisipasi masyarakat yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah. Peneliti melakukan wawancara dengan kasi pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil wawancara tersebut ia mengatakan bahwa perlu adanya partisipasi masyarakat.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, menyertakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian Mada dkk (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif

TINJAUAN PUSTAKA

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi aparatur merupakan keahlian masing-masing individu yang memungkinkan seseorang mencapai kinerja yang baik. Kompetensi aparatur merupakan faktor internal dan menjadi suatu yang penting (Nurkhasanah, 2019). Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi, semakin baik kompetensi akuntansi yang dimiliki oleh aparatur pengelola dana desa maka akan baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban bersih dan melaporkan yang sebenarnya serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat (Nurdin dan Wijaya, 2019).

Ketika *principal* memberikan amanah kepada *agent* dalam wewenang atas tanggungjawab sebagai bentuk pertanggungjawab segala aktivitas yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepihak *principal* sebagai pihak yang berwenang. Jika perangkat desa itu paham atas akuntabilitas pengelolaan dana desa maka tidak akan terjadi penyelewengan anggaran oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Pendapat tersebut juga didukung dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh Mada dkk (2017).

H1: Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Komitmen organisasi bisa dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Apabila setiap pegawai atau aparatur pemerintah desa memiliki komitmen organisasi yang tinggi, maka mereka pasti akan meningkatkan kualitas dan rasa tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan desa. Semakin tinggi komitmen organisasi para aparatur pemerintah desa, maka akan semakin tinggi pula tingkat rasa tanggungjawabnya sampai pada akhirnya akan melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel (Fauzi, 2018).

Komitmen organisasi yang tinggi juga menunjukkan akan mudah untuk menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam mengelolan keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan kesiapan dari aparatur desa yang diharapkan akan mendukung dan menjalankan program yang telah ditetapkan. Keberhasilan pengelolaan dana desa secara akuntabel yang dilaksanakan aparatur desa sebagai wujud komitmen aparatur desa dalam upaya pengelolaan dana desa. Komitmen yang tinggi merupakan alat yang menjalankan organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan dan ditetapkan sebelumnya (Naryati, 2020).

H2 : Penerapan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi Masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat (Perdana, 2018).

Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa. Keterlibatan masyarakat akan mempengaruhi pengambilan keputusan pada pemerintahan desa, oleh karena itu ada pengaruh positif antara peran masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa (Fauzi, 2018).

H3: Penerapan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah aparatur di 10 desa yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Simple Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperlihatkan strata yang ada dalam populasi itu. (Sugiyono, 2017: 120).

Operasional Variabel

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya variable yang akan diteliti dalam penelitian ini :

a. Variabel Independen

Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat.

b. Variabel Dependen

Variabel Dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Independen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std Deviation
X1	57	40	50	2611	45,81	3,335
X2	57	36	50	2572	45,12	3,766
X3	57	33	45	2373	41,63	3,022
Y	57	39	50	2628	46,11	2,914
Valid (listwise)	N 57					

Sumber : Pengelolaan Data SPSS IBM 126

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa:

- Variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X1) dengan jumlah responden (N) sebanyak 57 responden dengan nilai minimum adalah 40, nilai maksimum adalah 50, nilai rata-rata (*mean*) adalah 45,81 dan nilai Standar deviasi adalah 3,335.
- Variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X2) dengan jumlah responden (N) sebanyak 57 responden dengan nilai minimum adalah 36, nilai maksimum adalah 50, nilai rata-rata (*mean*) adalah 45,12 dan nilai Standar deviasi adalah 3,766.
- Variabel Partisipasi Masyarakat (X3) dengan jumlah responden (N) sebanyak 57 responden dengan nilai minimum adalah 33 nilai maksimum adalah 45, nilai rata-rata (*mean*) adalah 41,63 dan nilai Standar deviasi adalah 3,022.
- Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dengan jumlah responden

Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Kompetensi	X1.1	0,530	0,256	Valid
	X1.2	0,621	0,256	Valid

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Aparatur Pengelola Dana Desa (X1)	X1.3	0,673	0,256	Valid
	X1.4	0,399	0,256	Valid
	X1.5	0,537	0,256	Valid
	X1.6	0,625	0,256	Valid
	X1.7	0,654	0,256	Valid
	X1.8	0,542	0,256	Valid
	X1.9	0,528	0,256	Valid
	X1.10	0,650	0,256	Valid
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X2)	X2.1	0,288	0,256	Valid
	X2.2	0,758	0,256	Valid
	X2.3	0,723	0,256	Valid
	X2.4	0,490	0,256	Valid
	X2.5	0,808	0,256	Valid
	X2.6	0,731	0,256	Valid
	X2.7	0,488	0,256	Valid
	X2.8	0,377	0,256	Valid
	X2.9	0,344	0,256	Valid
	X2.10	0,288	0,256	Valid
Partisipasi Masyarakat(X3)	X3.1	0,625	0,256	Valid
	X3.2	0,687	0,256	Valid
	X3.3	0,709	0,256	Valid
	X3.4	0,483	0,256	Valid
	X3.5	0,532	0,256	Valid
	X3.6	0,581	0,256	Valid
	X3.7	0,660	0,256	Valid
	X3.8	0,693	0,256	Valid
	X3.9	0,709	0,256	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y1	0,437	0,256	Valid
	Y2	0,628	0,256	Valid
	Y3	0,641	0,256	Valid
	Y4	0,611	0,256	Valid
	Y5	0,628	0,256	Valid
	Y6	0,367	0,256	Valid
	Y7	0,485	0,256	Valid
	Y8	0,570	0,256	Valid
	Y9	0,636	0,256	Valid
	Y10	0,360	0,256	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah (2022)

Berdasarkan hasil Tabel 2 di atas, maka hasil koefisien korelasi setiap pernyataan dalam variabel kompetensi Aparatur pengelola dana desa (X1) Komitmen organisasi pemerintah desa (X2), Partisipasi masyarakat (X3) dan Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) lebih besar dari nilai rtabel 0,256 sehingga semua butir pernyataan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

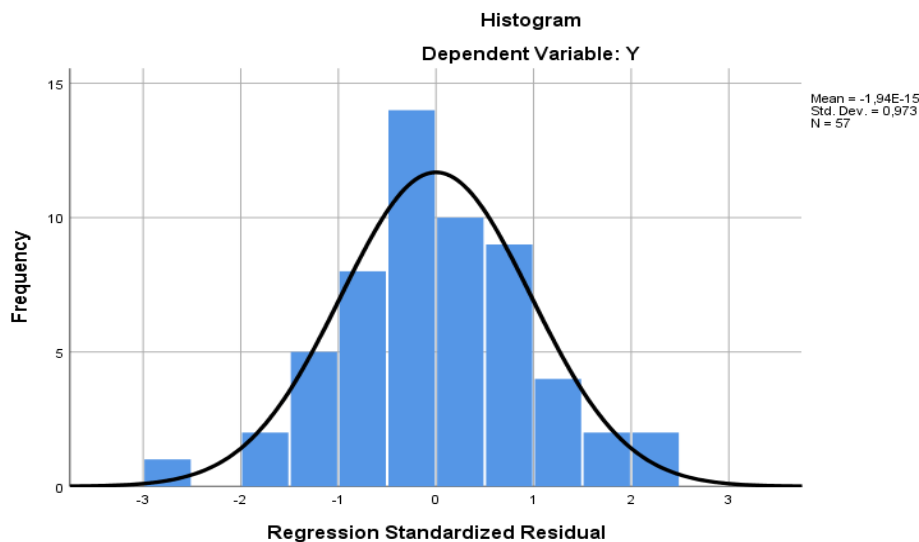
Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X1)	0,761	Reliabel
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X2)	0,752	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,806	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,711	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah (2022)

Berdasarkan hasil Tabel 3 di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Normalitas



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Dari Gambar 1 terlihat bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal. Dengan demikian sampel tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

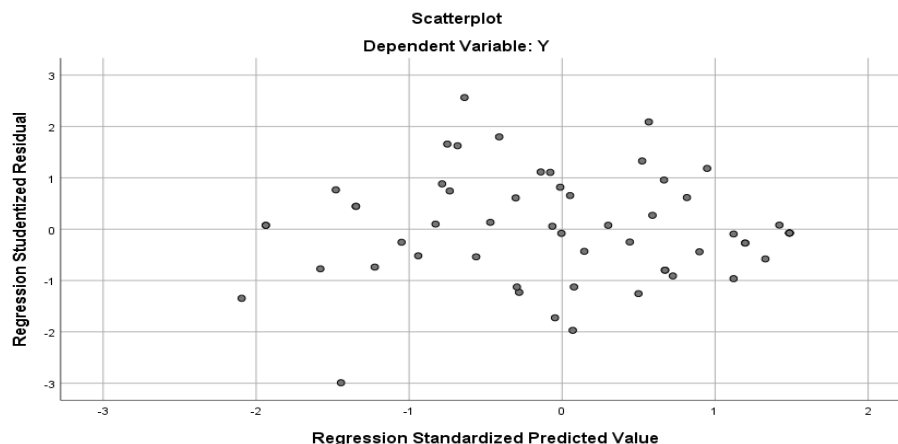
Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	2,127	2,692		,790	,433		
X1	,422	,073	,483	5,781	,000	,418	2,395
X2	,177	,071	,229	2,503	,015	,349	2,861
X3	,400	,060	,415	6,642	,000	,745	1,342

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengelolaan Data SPSS IBM 26

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa *tolerance value* > 0,1 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada interaksi variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa.(X1), Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X2) dan Partisipasi Masyarakat (X3).

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari output Gambar 2 uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,127	2,692		,790	,433
	X1	,422	,073	,483	5,781	,000
	X2	,177	,071	,229	2,503	,015
	X3	,400	,060	,415	6,642	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui persamaan regresi linier berganda, yaitu:

$$Y = 2.127 + 0,422 X1 + 0,177X2 + 0,400X3$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) = 2.127 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel independent (X1, X2, X3) sama dengan nol, maka variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sama dengan 2.127
- b1 = 0,422 adalah besarnya koefisien regresi X1 (Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa), yang berarti setiap peningkatan X1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,422 atau 42% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa meningkat, maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa akan meningkat. Jadi, variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa memiliki arah hubungan positif terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- b2 = 0,177 adalah besarnya koefisien regresi X2 (Komitmen Organisasi Pemerintah Desa), yang berarti setiap peningkatan X2 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,177 atau 18% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika variabel komitmen organisasi pemerintah desa meningkat, maka Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat. Jadi, variabel komitmen organisasi pemerintah desa memiliki arah hubungan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b3 = 0,400 adalah besarnya koefisien regresi X3 (Partispasi masyarakat), yang berarti setiap peningkatan X3 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,400 atau 40% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika variabel Partispasi masyarakat meningkat, maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa akan meningkat. Jadi, variabel partisipasi masyarakat memiliki arah hubungan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Koefisien Determinasi

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

Model Summary^b

1	,920 ^a	,846	,837	1,177
---	-------------------	------	------	-------

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan Data SPSS IBM 126

Berdasarkan Tabel 6 besarnya nilai R adalah 0,846 yang berarti sebesar 84.6% variabel independen yaitu Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X1), Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X2) Dan Partisipasi Masyarakat (X3) mampu menjelaskan atau menggambarkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Sedangkan sisanya sebesar 15,4% dijelaskan atau digambarkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7 Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	401,940	3	133,980	96,705	,000 ^b
	Residual	73,429	53	1,385		
	Total	475,368	56			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2022)

Pada Tabel 7 hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 96,705 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,70. Oleh karena itu dikarenakan nilai dari $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5.092 > 2,78$ dan nilai sig. < 0.05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dengan kata lain Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X1), Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X2) Dan Partisipasi Masyarakat (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2,127	2,692		,790	,433
	X1	,422	,073	,483	5,781	,000
	X2	,177	,071	,229	2,503	,015
	X3	,400	,060	,415	6,642	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 8 dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen sebagai berikut :

- Nilai signifikansi variabel kompetensi aparatur pengelolaan dana desa diperoleh tingkat signifikansi sebesar $5.781 > 0.05$ sedangkan nilai T_{tabel} adalah 1.674 sehingga nilai uji $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($5.781 > 1.674$) maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa kompetensi aparatur pengelolaan dana desa secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- Nilai signifikansi variabel komitmen organisasi pemerintah diperoleh tingkat signifikansi sebesar $2.503 > 0.05$ sedangkan nilai T_{tabel} adalah 1.674 sehingga nilai uji $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2.503 > 1.674$) maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa komitmen organisasi pemerintah secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- Nilai signifikansi variabel partisipasi masyarakat diperoleh tingkat signifikansi sebesar $6.642 > 0.05$ sedangkan nilai T_{tabel} adalah 1.674 sehingga nilai uji $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($6.642 > 1.674$) maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X1) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kabupaten Deli Serdang. Artinya semakin tinggi tingkat aparatur desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Hal ini dikarenakan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa yang tinggi seperti pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap lainnya yang dapat mendorong terciptanya pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Kompetensi yang baik juga mendorong aparatur desa untuk bekerja secara efektif, efisien dan produktif.
- Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dikarenakan bahwa komitmen yang tinggi akan mendorong kinerja aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Hal ini dikarenakan apabila seorang aparatur desa memiliki rasa terhadap organisasi yang dijalankannya dia akan bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan didalam organisasi tersebut. Hal ini secara tidak langsung akan mendorong keberhasilan dalam mencapai pengelolaan dana desa yang akuntabel sesuai dengan tujuan organisasi tersebut.
- Partisipasi Masyarakat (X3) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kabupaten Deli Serdang. Artinya untuk

menciptakan Good Governance diperlukan keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi dalam penyusunan APBDes. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes maka akan semakin terarah dan menjadi lebih baik sehingga masyarakat aktif dalam menggerakkan program kegiatan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan peneliti terkait dengan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut : Pemerintah Desa, agar lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa Aparatur desa diharapkan lebih terampil, cerdas dan cekatan dalam mengelola keuangan desa serta giat dalam mengikuti seminar atau BIMTEK yang dilakukan setiap tahun oleh pihak-pihak yang terkait yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan anggaran, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan supaya tidak terjadi penyelewengan dan korupsi yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Begitu juga masyarakat harus berpartisipasi dalam musyawarah desa. Perlunya membangun kesadaran masyarakat dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desanya. Menyampaikan aspirasi atau masukan sesuai dengan mekanisme seharusnya. Dikarenakan aspek tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A. A. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. 2017. Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2)
- Medianti, Larastika. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat, Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi empiris pada Desa-desa di Kabupaten Bintan). *Jurnal Ekonomi*. Universitas Riau
- Naryati, D. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sunggal Dan Kecamatan Patumbak. *Doctoral dissertation*, UMSU
- Nurdin, Y., dan Wijaya, I. 2019. Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 1(1)
- Nurkhasanah, N. 2019. Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa: studi kasus Desa di Kecamatan Pancur Kab. Rembang. *Doctoral dissertation*, UIN Walisongo

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang siklus dan batas waktu pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes

Perdana, K. W. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

_____. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*